

## **Perpecahan dan Soliditas Elite Partai Golkar Pada Pemenangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015**

**Sofyan Muhamad**

Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong

Email: sofyan@gmail.com

### **Abstract**

Conflict and Division of political parties in Indonesia is not a new issue, but the phenomenon had long been party Schism happened before, in the era of reform party politics have always been in a split issue with hit never finished, one of the political parties are Golongan karya, the ruling party during the new order Government has always been conflicts and the party's internal divisions, the year 2014 Golongan karya again struck with the dynamics of the Division and gave birth to the dualism of the DPP at the level of stewardship, this research aims to look at the Division and solid elite DPD I Golongan karya North Maluku on winning the election for mayor of ternate year 2015. in this research method used was qualitative case study method, in the technique of collecting data using interviews, documentation and the withdrawal of the conclusion, in this study the theory used to analyse problems is a theory institutional political party, with this theory the author can see solid and elite divisions Golongan karya ternate city in the regional head election momentum the year 2015.

The results of the research there were some problems occurred in the internal Golongan karya ternate city, that the occurrence of structural conflict between Superintendent DPD I North Maluku with DPD II city of ternate, in addition there is also a policy dismissal a number of party cadres in ternate city conducted by Chairman of DPD I North Maluku, the split of the party in the region is inseparable with the dynamics of the political elite at the central level, that the split at the level of DPP implicates against decline of votes in the election of Golongan karya regional heads of ternate city, the party defeats 2015 work on the caused level of solid elite is not well formed, and this dismissal policy is the starting point of the party elite and splits in the political interest of the element value in the selection of the head of the regional city of ternate.

Keywords: Split, Soliditas party, the election of the head of the regional

## **PENDAHULUAN**

Perhelatan partai politik di era reformasi Golkar pada proses suksesi Pemilu Presiden 2014 secara internal tidak memilih/memutuskan calon Presiden dari partai yang berlambang pohon beringin ini, dinamika ini bagian dari titik awal terjadinya benturan atau berbeda pendapat sehingga mengara pada konflik sesama elite dalam tubuh partai Golkar di tinggakat pusat. Konflik elite Partai Golkar yang berjalan selama 1 tahun lebih terakhir tampaknya mulai kehilangan kepercayaan rakyat terhadap partai yang bersimbol pohon beringin ini. Bergulirnya era reformasi, suksesi kekuasaan politik Partai Golkar sebetulnya tidak selalu baik. Pada tahun 2014 Partai Golongan Karya (Golkar) di massa kepemimpinan Abruzal Bakri kembali di gujur konflik di tingkat DPP, konflik ini berlangsung dalam agenda musawara nasional (Munas 2014).

Perpecahan elite di tingkat pusat merembet sampai ke tingkat DPD I Golkar Maluku Utara, dimana Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie memecat sejumlah pengurus partai yang di kota ternate diantaranya Ikbal Rurai, Jumal Wange, dan Arifin Djafar selaku Ketua DPD II Golkar Kota Ternate, Jusman Arifin, Alwi Ishak, kebijakan atas pemecatan ini di sebabkan bahwa sebagian kader partai golkar kota ternate melangkahi intruksi atas keputusan DPD I Golkar mauku utara dan membagun konsolidasi untuk memberikan dukungan kepada kubu Agung Laksono, maka partai golkar dalam suksesi pemilihan kepala daerah secara serentak pada tanggal 9 desember 2015 mendatang di warnai dengan perpecahan elite di tingkat daerah, maka dalam penelitian ini yang akan di teliti adalah melihat dinamikan perpecahan dan soliditas elite partai golkar kota ternate dalam pemenangan pemilihan walikota dan wakil walikota ternate periode 2015-2020, di samping itu penulis akan menelusuri faktor-faktor apa sajah yang melatarbelakangi sehingga partai golkar kota ternate berada pada ruang lingkup perpecahan elite dan bagaimana partai golkar kota ternate menjaga soliditas elite partai dalam momentum pilkada kota ternate tahun 2015.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam artikel ini jenis penelitian menggunakan pendekatan metode studi kasus (case studies) kualitatif, ada beberapa definisi mengenai pendekatan studi kasus (case studies) menurut Suharsimi (2002:120) adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, teliti, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.

## **KERANGKA TEORI**

Maka penulis pada artikel ini yaitu kajian teoritik dan tinjauan pustaka dapat membuat arah penelitian dalam menganalisis, memetakan bagaimana proses internal partai golkar kota ternate dalam menjaga soliditas kelembagaan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Tahun 2015 yang sarat dengan kepentingan-kepentingan aktor politik. Adapun kerangka teoritik yang dipakai oleh penulis yaitu

sumber yang di anggap memiliki kompetensi sehingga dapat mendukung teori-teori untuk menganalisis permasalahan yang terjadi di objek penelitian ini.

### **1. Pelembagaan Partai Politik**

Kajian institusionalisasi atau di kenal dengan pelembagaan partai politik berhubungan erat dengan kajian politik yang dikembangkan oleh Duverger, Sartoti membuka sebuah pendekatan baru terhadap kajian partai politik yang menekankan pada persoalan internal, sedangkan Huntington adalah seorang pakar politik yang menawarkan beberapa aspek untuk mengkaji pelembagaan partai yang pertama dilihat dari aspek pengaturan dan prosedur (aturan main), memperoleh nilai (atau menjadi sebuah nilai), dan mencapai kestabilan (atau dijalankan secara konsisten). (Noor:2015:13). Huntington (1968) menawarkan bebrapa poin penting untuk melihat atau mengukur keberadaan pelembagaan partai politik yaitu, kemampuan untuk beradaptasi, kompleksitas, otonom, dan koherensi. Yang dimaksud dengan (Adaptasi) adalah seberapa jauh kemampuan partai untuk bertahan dalam sebuah sistem politik dalam konteks hubungan kekuasaan, (kompleksitas) dia berasumsi bahwa terdapat hubungan antara sejumlah ragam subunit dan kempuan partai politik untuk mempertahankan loyalitas anggotanya, dan keadaan ini secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap penciptaan stabilitas internal di dalam partai politik, (Otonomi) lebih menekankan pada aspek tingkat perbedaan dengan kelompok-kelompok yang lain, hal ini berarti bahwa partai politik yang terlembaga harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan indenpendensi maupun secara organisasional maupun procedural, (Koherensi) di ukur berdasarkan dan keberadaan consensus internal, dia berasumsi bahwa kapasitas untuk menciptakan kesatuan, kepercayaan diri, dan siplin sangatlah penting dalam pelembagaan partai.

Panbianco (1988) mendefenisikan pelembagaan sebagai strategi organisasi untuk menciptakan soliditas atau menjadi solid,

menurutnya partai yang terlembaga adalah partai yang dapat meningkatkan otonomi dari intervensi kelompok lain serta mempertahankan interdependensi antara actor-aktor internalnya. Imansyah, T. (2012). Permasalahan partai politik adalah lemahnya kelembagaan partai sehingga dinamika ini berimbas pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, belum lagi kader-kader partai yang terlibat dalam kasus korupsi masih saja di lakukan, sehingga praktek-praktek seperti ini secara tidak langsung melemahkan kelembagaan partai, regulasi kepartaian yang ada belum berpengaruh signifikan dalam penguatan kelembagaan partai, lemahnya kelembagaan partai yang ada saat ini lebih disebabkan oleh sistem internal partai yang belum modern. Romli, L. (2016).

Kajian tentang pelembagaan partai adalah sebuah kajian yang dilakukan oleh Randall dan Svasand. Mereka berpendapat bahwa pelembagaan seharusnya di pahami sebagai proses di mana partai menjadi mapan dalam pola perilaku, di dasarnya dari pemahaman ini keduanya telah meletakkan empat unsur atau dimensi untuk mengetahui pelembagaan partai yaitu, kesisteman, influsi nilai, otonomi,

dalam pengambilan keputusan, dan reifikasi. (Randall dan Svasand:2002:12-13). Partai politik di era reformasi melahirkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat, adanya persoalan yang paling mendasar yang membawa partai politik pada ruang lingkup perpecahan sehingga secara kelambagaan tidak berfungsi dengan baik ada tiga masalah yang harus di pecahkan yaitu, Ideologi dan platform, kohesifitas dan pengelolaan konflik, rekrutmen politik dan pembentukan kader. Efriza (2012:241). Pelembagaan partai politik sangat di pengaruhi oleh sifat dari peraturan partai, dalam pengerian ini bahwa sebagai lembaga demokrasi yang bentuk, operasi dan ekstensinya di atur dalam undang-undang. Kemampuan suatu partai politik merebut dan mempertahankan dukungannya di suatu pihak dan mengkonsolidasikan diri pada pihak lain antara lain, ditentukan oleh tingkat kelembagaan atau isntitusionalisasi partai itu sendiri.

## **2. Perpecahan Dan Soliditas Elite Partai**

Beberapa kalangan dalam dunia akademis telah membahas fenomena perpecahan dan soliditas partai politik secara mendalam. Masalah perpecahan dan soliditas partai politik telah di bahas dari berbagai sudut pandang. Yang di maksud dengan perpecahan adalah sebuah internal/institusi sebua partai terpeca atau terbagi beberapa faksi yang kemudian saling mengklaim sebagai pihak yang paling benar atau sah.( Lewis Fickett ) mengemukakan bahwa perpecahan dalam partai politik adalah persoalan pemahaman ideology sehingga melahirkan konflik secara personal di antara elite partai. Dilain (Martin Bull) meyakini bahwa perselisihan tentang orientasi dan strategi partai untuk mencapai tujuan adalah faktor-faktor yang patut dipertimbangkan manakalah membahas latar belakang perpecahan partai. Dalam pandangan ini dia berkesimpulan bahwa dalam suatu isntitusi partai terdapat kelemahan di antaranya lemahnya mekanisme disiplin dan digunakannya model rekrutmen partai berbasis massa lebih cenderung mengurangi disiplin kader dan pada akhirnya memberikan peluang

munculnya konflik internal.( Noor :2015:19-21).

## **3. Partai Politik**

Sejarah Kehidupan dan pertumbuhan partai politik mulain di kenal dalam bentuk yang moderen di Eropa dan Amerika Serikat sekitar Abad ke-19 bersamaan mulain dikenal sistem pemilihan dan parlementertaria, sepanjang perkembangan dan kemajuan sistem pemilihan dan parlementaria ini, maka berkembang pula sistem kepartain politik. Istilah partai yang melekat pada partai politik di gunakan untuk setiap bentuk kelompok organisasi yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik baik melalui pemilihan demokratis atau revolusi. ( Thoha : 2015 : 16 ). Budiarjo: 2008 : 403, Mendefinisikan Parai politik berangkat suatu Negara demokrasi membentuk wada organisasi politik mereka agara dapat menyatukan

orang-orang yang mempunyai orientasi mereka dapat terkonsolidasikan. Dapat membuat pengaruh mereka bisa terbuka lebar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan, Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan dalam bersifat idil. Sigum Neuman mengemukakan bahwa organisasi partai politik adalah bagian dari perkumpulan aktor politik yang berusaha untuk memperoleh kekuasaan dalam ruang lingkup pemerintahan serta menggalang dukungan rakyat sebagai kekuatan basis dalam konteks persaingan dengan satu kelompok atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Labolo dan Tegu :2017:181 bahwa partai politik seyoginya merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Namun saat ini kita rasakan partai politik telah mulai kehilangan arah dan tujuannya. Memang tidak dapat dipungkiri tujuan sederhana dari setiap partai politik adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan seperti yang dikatakan oleh Carl J. Friedrich ataupun pendapat dari La Palobara dan Anderson. Pada intinya mereka mengatakan bahwa organisasi partai politik merupakan sarana untuk menempatkan wakil-wakilnya di pemerintahan melalui mekanisme pemilu. Namun realitas yang terjadi, adalah terkadang partai politik lupa akan fungsinya karena terlalu asik dengan tujuan pragmatisnya tersebut.

#### **4. Perpecahan Partai Golkar**

Perpecahan partai Golkar di tingkat DPP adalah sebuah permasalahan yang cukup serius sebab dinamika perpecahan berdampak ketingkat kepengurusan DPD seluru Indonesia, sehingga melahirkan faksionalisme dalam internal partai Golkar, salah satu daerah yang kena dampaknya adalah DPD Golkar Maluku Utara seharusnya elite partai di tingkat lokal lebih mengedepankan mekanisme dalam proses

penyelesaian masalah yang melanda internal partai di tingkat DPP, tetapi dinamika yang terjadi di Maluku utara selama permasalahan berjalan suda melahirkan konflik di antara elite yang ada di Maluku utara, saling mengklaim antara sesama elite sehingga perpecahan ini berujung pada pemecatan sejumlah kader yang di anggap aspirasi yang di suarakan telah melanggar intruksi partai pada hal jika dilahat perhelatan yang teraji tingkat pusat belum ada titik penyelesaian, maka barang tetentu perpecahan ini akan berdampak pada soliditas partai ketika menghadapi pilkada serentak 2015 di Provinsi Maluku Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perpecahan Elite Partai Golkar Kota Ternate

Pertikaian dalam internal partai politik khususnya di Indonesia selalu saja mengara pada dinamika perpecahan para elite, dinamika semacam ini sering kali di lihat dari cara elite partai politik menafsirkan platform dan kebijakan internal atas isu-isu tertentu ini sangat berpengaruh dalam membentuk pragmatisme elite politik yang akan berpotensi merusak soliditas partai politik. Kekuasaan sering kali dijadikan sebagai tujuan utama elite partai politik, walaupun tujuan dari partai politik adalah merebut dan mempertahankan kekuasaan, di namika ini membuat para elite parpol dan politisi kemudian memanipulasi orientasi utama perjuangan parpol yang seharusnya iyalah berkontribusi dalam membangun tatanan masyarakat yang ideal berdasarkan platform atau ideology yang dianut, dalam pergeseran orientasi ini dengan sendirinya mengurangi peran ideology dalam membangun militansi dan soliditas partai politik. Berikut hasil wawancara dengan Abdulgani Sangaji Ketua DPD II Golkar Kota Ternate:

“Jadi yang pertama itu perpecahan di tingkat DPP, bahwa khusus kita di Maluku utara Golkar tetap solid menghadapi pilkada seretnak 2015, karena semua DPD kab/kota adalah produk hasil munas pekanbaru 2009”.( wawancara tanggal, 15 Februari 2018).

Perpecahan yang terjadi dalam tubuh partai Golkar bermula di tingkat DPP dan melahirkan dua kubu yaitu kubu Abrizal Bakire dan Agung Laksono, dan Golkar Maluku utara menganggap bahwa dinamika ini hanya akan terjadi di tingkat pusat tidak berpengaruh ketingkat provinsi maupun kab/kota yang ada di Indonesia, perpecahan internal partai Golkar memakan waktu hampir 1,5 tahun selama perseturan ini terus berlangsung partai Golkar menjadi tren topic yang selalu saja di wajanakan baik dari kalangan politisi maupun kalangan akademisi di tanah air, banyak yang beranggapan dinamika perpecahan yang melimpah parati Golkar adalah bagian dari

proses kedewasaan para elite partai untuk jeli sehingga dalam proses penyelesaian harus benar-benar berada pada koridor organisasi partai.

“Menurut Freddy Matalata mengingatkan bahwa putusan selah PTUN terdiri dari dua hal yang pertama adalah menundah keabsahan surat hasil munas ancol dan tidak bisa diberlakukan dan kedua ialah kubu angung laksono tidak dibolekan membuat keputusan-keputusan atas nama partai Golkar ” red.(Freddy Latumahina tanggal 24 Januari 2015).

Dalam pernyataan ini yang disampaikan oleh korwil Maluku dan Maluku utara adalah bagian dari sebuah iktiar politik, tetapi secara tidak langsung perpecahan di tingkat DPP berpengaruh ketingkat daerah sehingga perselisihan elite di tingkat lokal pun menuai kontrak atas perpecahan di tingkat pusat, berbagai macam

maneuver politik yang dilakukan oleh elite politik partai Golkar yang ada di kota Ternate membuat situasi internal khususnya di Maluku utara makin memanas sehingga melahirkan faksi yang mengatasnamakan mereka adalah bagian dari pengurus pro Anggung Laksono.

“Freddy Latumahina juga mengemukakan hasil rapat pleno tentang pemberhentian ketua DPD II Kota Ternate Arifin Djafar, Arifin Djafar diberhentikan karena terbukti berhiyanat dan menyebrang ke kubu Angung Laksono dan masih ada sejumlah kader Golkar yang beralih dukungan ke kubu Agung Laksono di antaranya Jusman Arifin, Hamid usman, Ikbal Rurai, Jumal Wange, Alwi Ishak, dan Muhlis Tamanyira”. ungkap (Freddy Latumahina tanggal 24 Januari 2015).

Pentingannya konsolidasi demokrasi di jadikan sebagai dasar, arah dan tujuan partai politik semua itu sangat jelas di tuangkan dalam UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik, dalam pasal 10 UU Partai politik menjelaskan bahwa orientasi partai politik ialah memajukan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila serta menjaga mudaya dan etika politik di tanah air, hal ini diperkuat dalam pasal 27 dan 28 AD/ART partai Golkar menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan pada hakikatnya dilakukan secara demokratis dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang suda di atur dalam aturan organisasi partai.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, A. & Kambo, G. 2013 Konflik ketiga elit pada pemilihan Walikota & Wakil Walikota Makasar 2013.
- Astriya, D. (2014). Konflik Internal Partai Amanat Nasional (PAN) di Provinsi Lampung Tahun 2013 (Studi Kasus Pemberhentian Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN
- A Padallingan, M. (2012). kekalahan Partai Golkar Pada Pemilukada Di kabupaten Toraja Utara 2010 (Doctoral dissertation).
- Asmadianto, A., & Nurmandi, A. (2016). Konflik Internal Dan Rekrutmen Politik Partai Golkar Sulawesi Barat Menghadapi Pemilu dan Pilkada di Sulawesi Barat 2014). *Journal of Governance and Public Policy*.
- Andriadi, Fayakhun, 2014. *Golkar Transformer* RMBOOKS Graha Pena, Jakarta.
- Asep, Nurjana, 2013. *Ketidak stabilan Electoral Dan Kehancuran Politik Aliran UMM* Press, Malang.
- Budiarjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Bogdan, Robert C and Biklen. 1982. *Qualitative Reasearch For Education an Introduction To Theori and Methods* Boston Alin And Bacon.

Efriza, 2012. *Political Explore, Sebua Kajian Ilmu Politik*, Cv Alfabeta, Bandung

Effendi, A. T. (2015). *Dampak Konflik DPP Partai Golkar Terhadap DPD Partai Golkar Kota Surabaya* (Doctoral dissertation Universitas Erlangga).

Eristyawan, F. N. (2013). *Pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa (Studi Kasus Kemosotan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Jawa Timur)*

Noor, Firman. 2015. *Quo Vadis Demokrasi Kita* “ PT Wahana Semesta Intermedia Jakarta.

2015. *Perpecahan Dan Soliditas Partai Islam Di Indonesia* LIPI Press Jakarta.

Firmanzah, 2011. *Mengelola Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrai* Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Faisol, A. 2014. *Konflik internal PDI-Perjuangan Tahun 2005-2009*

Kaunar, A. S,IP (2011). *Pusaran Politik Dalam Rekrutmen Kandidat Partai Golkar (Studi Tentang Rekrutmen Kandidat Oleh Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Periode 2010-2015)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Huntington, P. Samuel 2004. *Tertib Politi, Pada Masyarakat Yang sedang Beruba* PT Raja Grafindo Persada Jakarta.

Halid, Nurdin. 2016. *Suara Golkar Suara Rakyat* Jetpress Jakarta.

Halim Abdullah, 2014. *Politik Lokal, Pola, Aktor & Alur Dramatikanya* LP2B Yogyakarta.

Imansyah, T. (2012). *Regulasi partai politik dalam mewujudkan penguatan peran dan fungsi kelembagaan partai politik*. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*.

Irtanto. 2008. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Joko, J. Prihatmoko Moesafa. 2008. *Menangkan Pemilu Di Tengah Oligarki Partai Pusta Pelajar* Yogyakarta.

Jainuri.